

Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Arifudin¹⁾, Abdul Rivai²⁾, Rina Wulandari³⁾

^{1,2,3)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako, Palu Indonesia

Email: arimongkoa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Dasar penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan obserfasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive* dengan menetapkan 7 informan yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan kebijakan dana desa di Desa Tofuti. Sedangkan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) aspek ukuran dan tujuan kebijakan yang dimana aparat desa belum memahami betul apa yang dimaksud dari ukuran dan tujuan kebijakan sehingga hanya memutuskan satu program kerja yang pada akhirnya tidak telalu berdampak besar terhadap masyarakat. 2) aspek sumberdaya yang belum memadai, kurangnya pemahaman pegawai dan cara mengoperasikan teknologi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya pelatihan dan juga sosialisasi terhadap aparat desa dan juga masyarakat. 3) aspek karakteristik agen pelaksana masih ada pegawai yang tidak bekerja sesuai tupoksi kerjanya. 4) aspek sikap para pelaksana belum menunjukkan sikap yang mendukung dalam melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pengelolaan dana desa. 5) aspek komunikasi antar organisasi pelaksana yang belum optimal karena kurangnya koordinasi antara pegawai dan juga terhadap masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dana desa. 6) aspek lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik masih belum terlalu mempengaruhi betul terhadap kehidupan masyarakat karena dari tiga lingkungan tersebut belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga masih kurangnya melibatkan atau berinteraksi dengan masyarakat serta kurangnya pengaruh politik terhadap kebijakan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Dana Desa

Abstract

This study aims to see about the implementation of the Village Fund Policy in Tofuti Village, Bungku Tengah District, Morowali Regency. The basis of this research is based on qualitative research with descriptive research. While the data interview technique was carried out by observation, interview, and documentation. The data used in this study are secondary data and primary data. Determination of information in this study using purposive by determining 7 capable informants and reviewing the village fund policy policy in Tofuti Village. Meanwhile, data analysis includes data, data condensation, data presentation and data retrieval. The results showed 1) the aspect of size and policy objectives where the village apparatus did not fully understand what was meant by the size and objectives of the policy so that they only decided on one work program which in the end had no major impact on the community.

2) inadequate resource aspects, lack of understanding of employees and how to operate technology in managing village funds, lack of training and also socialization to village officials and also the community. 3) in the aspect of the implementing agent, there are still employees who do not work according to their job duties. 4) the aspect of the attitude of the implementers has not shown a supportive attitude in doing the things mandated in the policy to make it easier for the community to access information on village fund management. 5) communication aspects between implementing organizations are not yet optimal due to coordination between employees and also with the community in implementing village fund policies. 6) Social, Economic, and Political environmental aspects have not really influenced people's lives because these three environments have not been able to improve the community's economy and are also less than or can be controlled by the community as well as political influence on these policies.

Keywords: Implementation of Village Fund Policies

PENDAHULUAN

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa).

Bupati Morowali mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Desa Tofuti pada tahun anggaran 2018 mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 652.220.000 Dana tersebut digunakan untuk membangun desa sesuai dengan yang dikeluarkan oleh peraturan menteri desa dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis dimana penulis mendapatkan gambaran permasalahan yaitu pada aspek Sumber Daya (kurangnya pemahaman

pemerintah Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali terkait pengelolaan Dana Desa tersebut), kemudian pada aspek komunikasi yaitu penyampaian informasi yang tidak transparan, sehingga terjadi miskomunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang mendapat informasi. Pelaksanaan dana desa di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali banyak memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat mulai dari proses perencanaan atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat belum tepat pada sasaran, seharusnya dengan adanya dana desa sudah sangat jelas titik pembangunan disetiap dusun. Hal lain juga dalam partisipasi masyarakat yang sangat kurang diikuti sertakan dalam pembahasan anggaran sehingga masyarakat menjadi pasif, yang tadinya ingin mengeluarkan ide atau gagasan untuk pembangunan desa yang lebih baik akhirnya menjadi apatis karna aspirasi mereka kurang ditanggapi oleh aparat desa.

Berdasarkan urain latar belakang masalah yang diuraikan diatas terlihat fenomena awal yang menunjukkan Dana Desa belum diterapkan secara optimal di Desa Tofuti kecamatan Bungku tengah Kabupaten Morowali sehingga penulis merumuskan permasalahan penelitian yang yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan Dana Desa di wilayah Desa Tofuti Kecamatan Bungku tengah Kabupaten Morowali?

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. (Thomas R, Dye dalam Deddy Mulyadi 2016;36)

kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (Anderson dalam Winarno 2012;21).

Implementasi merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan. (dikemukakan oleh Dunn dalam Dyah Ratih, 2011)

Implementasi Kebijakan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan Kepada Daerah dan Desa. (Nomor 50/ PMK.07/ 2017 pasal 1).

Pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan sebagai personifikasi dari kekuasaan (Badjido & Samad, 2014). Berdasarkan Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa, dijelaskan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2).

Menindak lanjuti kebijakan tentang Desa dan Dana Desa, Kabupaten morowali menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa. Dimana Desa Tofuti mendapat anggaran Dana Desa ditahun 2018 sebesar Rp.652.220.000, dengan Dana Desa ini diharapkan menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai upayah meningkatkan pembangunan baik dibidang infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah berasal dari kelola. Sedangkan kelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dalam

konsep tata kelola pemerintahan seluruh aspek pemerintahan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sumber daya alam yang ada memiliki model pengelolaan dengan menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik. (Winarno Hamiseno).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder yaitu: dokumen, arsip, laporan, implementasi, dan buku ilmiah. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui tahap Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan model interaktif dari Miles Huberman 2014 yakni sebagai berikut: *pertama*, Pengumpulan data (*data Collection*). *Kedua*, Kondensasi data (*data Condensation*). *Ketiga*, Penyajian data (*data Display*). *Keempat*, Penarikan kesimpulan (*Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

Desa Tofuti merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai desa yang otonom. Desa Tofuti mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa, Desa Tofuti pada tahun anggaran 2018 telah menerima transfer aliran dana desa sebesar Rp.

652.220.000,00 yang digunakan untuk mendanai bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Setiap Kebijakan Publik harus memiliki standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Ketika standar dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen implementasi. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam pelaksanaan suatu Kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Ukuran kebijakan implementasi kebijakan dana desa (DD) di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali yang menjadi sasaran adalah kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan fakta yang dilihat langsung oleh penulis dilapangan dan hasil wawancara serta dokumentasi bahwa Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti sudah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tetapi yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya yang harus menjadi tolak ukur mereka. Tolak ukur yang seharusnya dilihat oleh pemerintah desa yaitu apakah dengan terbangunnya jalan tani sudah meningkatkan perekonomian

masyarakat tersebut, dari hasil apa yang dilihat penulis dilapangan perekonomian masyarakat belum terlalu meningkat.

Dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa Ukuran dan Tujuan dari Implementasi Dana Desa di Desa tofuti belum sepenuhnya optimal dikarenakan dari beberapa aparat desa belum mengerti ukuran dan tujuan dari kebijakan yang mereka buat.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa, Sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan setiap program yang direncanakan oleh pemerintah desa. Oleh karna itu, diperlukan kemampuan sumber daya yang pandai dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut, tidak hanya pada sumber daya manusia saja namun juga sumber daya lainnya misalnya finansial, fisik, material, mesin, kemampuan teknologi dan lain-lain. Diantara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa karna mereka merupakan faktor penggerak dan penentu sukses tidaknya program tersebut. Pada pemerintahan di Desa Tofuti dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari hasil wawancara di atas dan pengamatan langsung peneliti yang dilakukan dilapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti dilihat dari

sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang baik dikarenakan dari beberapa aparatur desa masih ada yang belum mengerti dengan cara mengoperasikan teknologi kemudian dari tingkat pendidikan masih beberapa yang hanya lulusan SMA seperti sekretaris, kaur dan juga kapala dusun. Sehingga memang perlu diadakannya pelatihan kepada aparat desa itu sendiri sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Berbicara mengenai indikator sumber daya yang meliputi tingkat kemampuan dari para pelaksana kebijakan sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.

Aspek Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terkait dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kemudian dari hasil wawancara di atas dan pengamatan langsung peneliti yang dilakukan dilapangan yang diperkuat dengan dokumentasi, di mana peneliti melihat sikap pelaksana kebijakan di Desa Tofuti sudah mulai keterbangunan atau persamaan pendapat yang dimana dalam setiap pelaksanaan program kerja sudah terlaksana dengan baik, dikarenakan para pelaksana kebijakan sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab

masing-masing yang mereka harus pertanggung jawabkan sendiri secara legal sehingga menghasilkan suatu pola hubungan yang baik antar para agen pelaksana. Namun berbeda dengan dengan aparat desa sebelumnya yang saling tidak mengetahui tupoksi dari kinerjanya yang telah ditentukan, dikarenakan adanya sebagian aparat yang pro dan kontra terhadap kepala desa sebelumnya. Maka mengakibatkan hanya yang pro terhadap kepala desa yang selalu diberikan tanggung jawab walaupun sebenarnya bukan wilayah kerjanya.

Aspek Sikap para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan dana desa di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, belum menunjukkan sikap yang mendukung dalam melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses

informasi pengelolaan dana desa yang tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kebijakan dana desa.

Aspek Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Kemudian dari hasil wawancara diatas dapat kita jabarkan bahwa hubungan antara organisasi dari aparat desa maupun BPD dan masyarakat itu belum optimal dikarenakan adanya permasalahan yang terjadi antara masyarakat dan aparat desa, adapun sosialisasi yang dilakukan itu sudah diserahkan kepada masing-masing kepala dusun sehingga mereka bisa mensosialisasikan di masing-masing dusunnya.

Dari hasil wawancara diatas dan pengamatan peneliti dilapangan yang diperkuat dengan dokumentasi bahwa memang betul sosialisasi dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa hanya disampaikan kepada perangkat desa saja, untuk mensosialisasikan langsung kemasyarakat itu tidak dilakukan. Dalam pelibatan masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan itu hanya melibatkan orang-orang yang hanya memiliki peran penting pada pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa kurang efektif dan perlu ditingkatkan lagi agar programnya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Desa Tofuti.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Adapun dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa pengaruh dari lingkungan politik sangatlah minim. Dari pihak-pihak politik juga hanya terlibat ketika adanya pesta demokrasi maupun dari tingkat daerah maupun desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dana desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Tofuti mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten morowali dan masyarakat, karena kebijakan keterbukaan Dana Desa merupakan kebijakan yang memberikan peluang bagi Desa untuk dapat menjadi desa mandiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya sendiri, karena kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian dari desa itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi langsung dilapangan, wawancara dengan 7 orang informan serta dengan dokumentasi dapat

disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tofuti Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali menunjukkan belum berjalan secara maksimal karena tidak terpenuhinya enam aspek dari enam aspek sebagai alat yang digunakan untuk meneliti. Keenam aspek yang belum terpenuhi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi pelaksana.

Hal ini dapat dilihat dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan yang dimana aparat desa belum memahami betul apa yang dimaksud dari ukuran dan tujuan kebijakan. Kemudian dari aspek sumberdaya yang belum memadai, kurangnya pemahaman pegawai mengenai pengelolaan Dana Desa serta cara mengoperasikan teknologi dalam pengelolaan dana desa, kurangnya pelatihan dan juga sosialisasi terhadap aparat desa dan juga masyarakat. Selain itu dari aspek karakteristik agen pelaksana masih ada pegawai yang tidak bekerja sesuai tupoksi kerjanya. Adapun dari aspek sikap para pelaksana belum menunjukkan sikap yang mendukung dalam melakukan hal-hal yang diamanatkan dalam kebijakan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi pengelolaan dana desa. Serta dari aspek komunikasi antar organisasi pelaksana yang belum optimal karena kurangnya koordinasi antara pegawai

dan juga terhadap masyarakat dalam melaksanakan kebijakan dana desa.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1) Dalam aspek ukuran dan tujuan kebijakan perlu adanya pendalaman pemahaman terkait masalah kebijakan dana desa sehingga tidak hanya melakukan pembangunan yang tidak bisa mendukung perekonomian masyarakat yang hanya sampai sebatas itu saja, namun tidak berkembang sehingga terus berkesinambungan. 2) Dalam aspek sumberdaya perlu adanya penambahan pegawai yang memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi agar keterbukaan informasi di Dinas Pendidikan Morowali dapat terlaksana dengan baik. 3) Dalam aspek karakteristik agen pelaksana perlu adanya pembagian kerja yang jelas antar pegawai agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. 4) Dalam aspek sikap para pelaksana perlu adanya mempererat hubungan antara aparat desa dan juga masyarakat dan juga meningkatkan komitmen dalam setiap pelaksanaan kebijakan oleh pelaksana itu sendiri. 5) Dalam aspek komunikasi antar organisasi pelaksana perlu adanya langkah yang dilakukan dalam komunikasi dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan tugas atau program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Badjido, M. Y., & Samad, A. (2014). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di desa kayuangin kecamatan malunda kabupaten majene,

IV(1), 45-54.

- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Nugroho, Riant. 2016. *Kebijakakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. ALFABETA, cv
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aswar 2017 *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sibolang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*. Skripsi
- Nunik Chumaidah 2017 *Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*. Jurnal
- Yohanes Kira 2016 *Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Long, Tunggu dan Lembu Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan*. Jurnal
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana desa.
- Peraturan Mentri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dana Desa